

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Irwan 2011). Opini audit BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh pimpinan kementerian/lembaga di pemerintah pusat maupun kepala daerah di pemerintah daerah. Bahkan untuk mencapai opini tersebut, beberapa kepala daerah rela mengeluarkan uang suap kepada tim BPK agar daerah mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Sondi 2011).

Ada beberapa alasan bagi Pemerintah Daerah ingin mendapatkan WTP terhadap LKPD-nya, antara lain : 1) prestise bagi pemerintah daerah, karena WTP merupakan peringkat tertinggi/terbaik dari keempat jenis opini audit yang diberikan oleh BPK, 2) mendapat *reward* dari Kementerian Republik Indonesia sebesar Rp. 50 milyar, 3) mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel, 4) secara politis mendapatkan predikat WTP merupakan *entry point* untuk pencitraan pimpinan, 5) dari sisi hukum, perolehan predikat WTP dapat

mengelimir permasalahan-permasalahan hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah (Cardiman 2012).

Dalam RAKORNAS (Rapat Kerja Nasional Akuntansi) tahun 2011, Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa basis atau landasan dari *good governance* adalah *good finance reporting*, sedangkan inti dari pelaporan keuangan adalah ketertiban dalam penggunaan uang negara. Boediono menjelaskan, bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah masih perlu terus ditingkatkan meski beberapa pos-pos pada laporan keuangan sudah menunjukkan perbaikan. Pernyataan ini diungkapkannya sebagai upaya pemerintah menuju *Good Governance*. Tetapi kenyataan di lapangan masih banyak pemeritah daerah di Indonesia yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I - 2010 yang disampaikan pada Maret 2011, BPK mencatat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009, dari total 348 LKPD hanya 14 LKPD yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Tidak Memberikan Pendapat sebanyak 45 LKPD dan Tidak Wajar sebanyak 30 LKPD. Sisanya berupa Wajar Dengan Pengecualian.

Sebagai contoh dari seluruh Kabupaten se-Madura hanya satu kabupaten yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yaitu Kabupaten Bangkalan itupun pada tahun 2010. Bahkan ada juga tahun dimana opini audit bagi Kabupaten se-Madura ini serempak mendapatkan opini tidak wajar yaitu pada tahun 2008.

Sebagaimana akan disajikan dalam tabel dibawah ini opini audit BPK pada kabupaten di madura dari tahun 2006 sampai 2010 :

KABUPATEN	OPINI				
	2006	2007	2008	2009	2010
Bangkalan	WDP	WDP	TW	WDP	WTP
Sampang	WDP	WDP	TW	TW	WDP
Pamekasan	WDP	WDP	TW	WDP	WDP
Sumenep	WDP	WDP	TW	WDP	WDP

(sumber : IHPS BPK)

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) :

1. Relevan

Yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Faktor yang mungkin mempengaruhi opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Warisno (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Faktor yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini penelitian Fadli (2010) mengatakan jika pemerintah tidak menggunakan teknologi informasi, maka pemerintahan daerah akan terisolasi dan tertinggal dalam dunia dengan pembedaan digital. Selain itu, revolusi informasi yang didukung dengan pesatnya teknologi juga telah terjadi di luar bidang pemerintahan. Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi opini audit adalah sistem pengendalian intern. Sesuai dengan laporan BPK pada tahun 2007 menyatakan bahwa pada umumnya, Sistem

Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan yang berikut. Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap opini audit yaitu kinerja pegawai. Dalam penelitian Mardiana (2011), mengatakan bahwa suatu pemerintahan daerah tidak akan mencapai tujuan organisasi dan mencapai suatu keberhasilan tanpa adanya pengaruh dari kinerja pegawai. Selain itu kinerja pegawai khususnya di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah juga dapat memberikan peran untuk suatu pengelolaan keuangan daerah, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah khususnya mengenai pengawasan fungsional. Hasil pemeriksaan BPK tentang pemeriksaan kinerja menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan masalah administrasi. Faktor – faktor tersebut diatas yang mungkin mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah dari Kabupaten se-Madura.

Disamping hal tersebut diatas, alasan yang melatarbelakangi peneliti menulis penelitian ini adalah dari fenomena yang menyatakan bahwa hasil laporan audit BPK mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah se-Kabupaten di pulau Madura mayoritas adalah WDP (wajar dengan pengecualian), hanya satu Kabupaten yaitu Bangkalan yang baru mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2010. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen yaitu kinerja pegawai, kinerja pegawai dalam penelitian ini

digunakan karena kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam suatu pemerintah daerah dengan wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi yang mungkin memiliki hubungan sangat kuat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh warisno (2009) dan variabel dependen peneliti menggunakan pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura. Peneliti juga menggunakan subjek penelitian menjadi Kabupaten se-Madura.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?
3. Apakah sistem pengendalian intern mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?

4. Apakah kinerja pegawai mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?
5. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kinerja pegawai mempengaruhi pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh teknologi informasi terhadap pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh kinerja pegawai terhadap pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kinerja

pegawai terhadap pemenuhan kriteria laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah Kabupaten se-Madura?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Memberikan masukan faktor apa saja yang dapat memenuhi kriteria untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan agar bisa memperoleh dan mempertahankan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

2. Bagi universitas

Sebagai wacana dan informasi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang sebagai bahan pengembangan pendidikan dan latihan bagi seluruh mahasiswa baik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura maupun selain mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan wajar tanpa pengecualian.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode apa yang akan digunakan untuk penelitian ini, dari definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis data, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, baik dari objek penelitian, analisis data dan pembahasannya.

Bab 5 Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran buat peneliti selanjutnya.